

SIARAN PERS

Seminar Forum Kajian Pembangunan “Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital”

Jakarta, 5 Oktober 2022 — Sekitar 64,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki perempuan.¹ Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pada masa pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19), usaha yang dimiliki perempuan mengalami dampak yang lebih berat daripada usaha yang dimiliki laki-laki. Sebagian besar tantangan yang dihadapi UMKM yang dimiliki perempuan untuk dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19 berhubungan dengan kecakapan digital.

Mengingat besarnya peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, diperlukan kebijakan yang secara khusus bertujuan memulihkan UMKM pascapandemi COVID-19 sekaligus mempercepat transformasi digital. Dalam berbagai studi, transformasi digital telah terbukti memberikan banyak manfaat bagi hampir semua kalangan masyarakat, termasuk perempuan. Transformasi digital dapat menjadi alternatif untuk melakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di berbagai sektor kerja, misalnya, dengan mendukung kegiatan kerja secara dalam jaringan (daring) serta mendorong partisipasi dalam membuka usaha (niaga-el/e-commerce). Internet juga terbukti dapat membuka kesempatan kerja yang lebih besar bahkan bagi perempuan dengan pendidikan yang relatif lebih rendah dengan memanfaatkan aplikasi yang ada pada telepon cerdas (*smartphone*) mereka. Lebih dari itu, transformasi digital berpotensi untuk memberdayakan perempuan dengan mengubah pola relasi gender yang tidakimbang. Namun begitu, transformasi digital juga membuka ruang bagi pelanggaran dan intensifikasi berbagai bentuk ketidakadilan gender, terutama bila platform dan regulasi ekonomi digital tidak memiliki sensitivitas gender.

Penggunaan internet oleh perempuan, termasuk dalam UMKM meningkat, namun, belum berdampak optimal bagi peningkatan pasar tenaga kerja perempuan secara keseluruhan

Dengan semakin menjamurnya akses ke internet dalam beberapa tahun terakhir, SMERU melakukan penelitian untuk melihat dampak dari ketersediaan internet terhadap pasar tenaga kerja perempuan di Indonesia. Studi ini menggunakan data dengan rentang 10 tahun dari Survei Angkatan Kerja Nasional dan Potensi Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Studi ini menemukan dampak positif dan negatif dari ketersediaan internet pada pasar tenaga kerja perempuan di Indonesia.² Dampak positifnya yaitu probabilitas peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan, terutama untuk bekerja secara penuh waktu. Sementara itu, dampak negatif dari ketersediaan internet terhadap pasar tenaga kerja perempuan adalah kemungkinan rendahnya probabilitas para perempuan untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi dan sektor-sektor formal. “Jadi, saat ini dengan keberadaan internet, perempuan lebih mungkin untuk bekerja secara penuh waktu tapi sayangnya jenis pekerjaan yang dilakukan bukan pada

¹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

² [*“Heterogeneous Impact of Internet Availability on Female Labour Market Outcomes in an Emerging Economy: Evidence from Indonesia”*](#)

sektor formal dan sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi,” ujar Nurmala Selly Saputri, peneliti dari SMERU.

Penggunaan internet juga menjadi salah satu strategi UMKM bertahan pada masa pandemi COVID-19. Veto Tyas Indrio, peneliti dari SMERU memaparkan bahwa pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah UMKM yang menggunakan internet. Lebih dari separuh UMKM kini menggunakan internet dalam kegiatannya— paling banyak untuk komunikasi bisnis, diikuti dengan penjualan/pembelian, pasang iklan, *browsing*, dan *mobile banking*. Sebagian besar UMKM yang menggunakan internet berskala mikro dan dijalankan oleh perempuan. “Hasil studi kami menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang menggunakan internet pada 2018 dan 2021. Selain itu, intensitasnya juga meningkat; internet digunakan untuk banyak kegiatan, misalnya untuk promosi dan menggunakan layanan bank,” ujar Veto.

Meskipun demikian, Selly menjelaskan bahwa perempuan masih mengalami tantangan dalam bekerja maupun memaksimalkan manfaat internet. Menurut Selly, rendahnya literasi digital, terbatasnya akses ke teknologi yang mumpuni, dan adanya ancaman kekerasan berbasis daring kian menyurutkan langkah perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja di Indonesia.

Memberikan dukungan kepada pelaku UMKM sesuai kebutuhan menurut gender, skala usaha, dan jenis usaha

Berbagai kebijakan penanganan COVID-19 menimbulkan dampak yang berbeda terhadap UMKM yang dimiliki/dikelola perempuan dan UMKM yang dimiliki/dikelola laki-laki. Hening Wikan, peneliti dari SMERU, menjelaskan bahwa lebih dari separuh UMKM yang dimiliki perempuan melakukan penjualan melalui media sosial, namun, strategi digitalisasi yang mereka adopsi cenderung lebih terbatas.³ “Analisis kualitatif dan kuantitatif kami menunjukkan bahwa selain keterbatasan pembiayaan untuk adopsi strategi digital dan keterampilan digital pelaku usaha perempuan, interaksi antara krisis akibat pandemi dengan institusi domestik menjadi faktor yang menyebabkan keterbatasan strategi digital UMKM perempuan,” ujar Hening Wikan, peneliti junior dari SMERU. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya ketimpangan beban kerja pengasuhan selama pandemi serta kuatnya peran gender tradisional dalam pengambilan keputusan terkait usaha.

Walaupun pelaku UMKM diberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk agar mereka bisa menjalankan usahanya pada masa pandemi COVID-19, hanya sedikit UMKM yang dimiliki/dikelola perempuan yang mendaftar dan dapat mengaksesnya. Minimnya informasi yang didapat oleh pelaku UMKM, persyaratan yang dianggap masih terlalu rumit, hingga minimnya fasilitas dalam mengakses dukungan menjadi kendala utama bagi UMKM perempuan untuk mengakses program pemerintah yang bertujuan mendukung UMKM.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, menyampaikan, “UMKM lokal, termasuk yang dimulai dan dibangun oleh perempuan, adalah penyokong lebih dari 60% PDB Indonesia. Maka akses terhadap panggung digital serta materi edukasi terkait pengembangan bisnis sangat penting agar perempuan pegiat UMKM bisa terus relevan dengan perkembangan zaman. Untuk menjawab

³ [“Men- and women-owned/led MSMEs and the COVID-19 Policy Responses in Indonesia”](#)

kebutuhan tersebut, Tokopedia selalu berkolaborasi dengan para mitra strategis, termasuk pemerintah, dalam menyediakan akses yang terjangkau bagi perempuan pegiat UMKM sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional, hingga meraja di negeri sendiri.”

Seminar “Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital” ini merupakan bagian dari seri seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2022. SMERU kembali menjadi tuan rumah pada periode Oktober dengan menyelenggarakan empat seminar dengan empat topik terkait transformasi digital. Melalui seri seminar ini, SMERU menyajikan sebuah wadah untuk berdiskusi tentang pentingnya mendorong transformasi digital sebagai upaya mempercepat pemulihan pascapandemi COVID-19 di Indonesia serta membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi perempuan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Ratri Indah Septiana
Kepala Bidang Komunikasi
The SMERU Research Institute
rseptiana@smeru.or.id
08161361514

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di: <https://smeru.or.id/id/event-id/meningkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-ekonomi-digital>

Tentang Forum Kajian Pembangunan (FKP)

FKP adalah forum tempat para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, komunitas internasional, dan pembuat kebijakan bertemu dan mendiskusikan hasil studi tentang isu-isu kebijakan pembangunan terkini di Indonesia. FKP diselenggarakan oleh konsorsium berbagai organisasi yang bekerja sama dengan Indonesia Project dari Australian National University (ANU). Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium FKP secara bergiliran menjadi tuan rumah untuk mengadakan seri seminar FKP. Informasi lebih lanjut tentang FKP dapat dilihat di www.fkpindonesia.org.

Tentang The SMERU Research Institute (SMERU)

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.